

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono, 1999).

Sementara itu pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi.

Arsyad (1999) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang diukur dengan melihat laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah itu sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (BPS, 2011). PDRB yang dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi di dalam sistem pemerintahan desentralisasi ternyata belum mampu dihasilkan dengan baik oleh daerah-daerah di Indonesia meskipun sistem Pemerintahan desentralisasi sudah berjalan cukup lama, salah satunya Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2008. Secara geografis Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6 056'49" – 7 0 45'00" Lintang Selatan dan 107 0 25'8" – 108 0- 7'30 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Garut didukung dari berbagai bidang diantaranya pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi, angkutan, lembaga keuangan, jasa-jasa dan lain lainnya. Hal itu tergambarkan pada tabel 1.1.

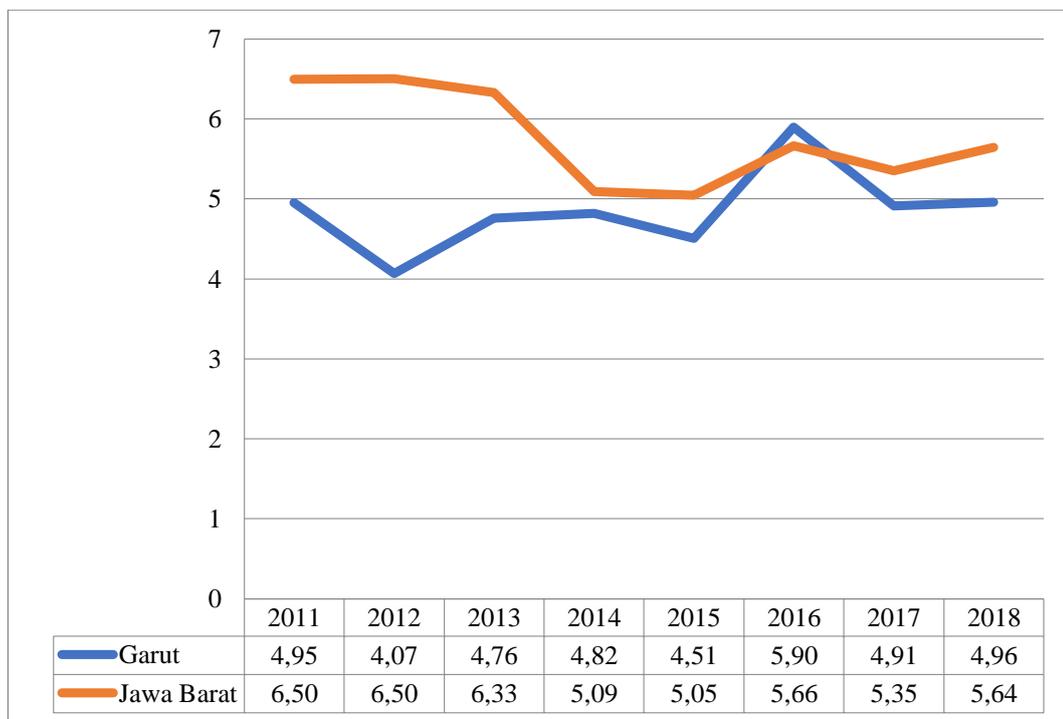
**Tabel 1.1 Data PDRB Harga Konstan dan Laju Pertumbuhannya
di Kabupaten Garut (Persektor Lapangan usaha)**

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					laju pertumbuhan (persen)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.161.548	11.197.707	11.705.835	11.977.731	12.241.774	2,26
Pertambangan dan Pengalihan	853.578	869.928	870.462	850.792	816.358	0,23
Industri Pengolahan	2.294.638	2.475.801	2.655.405	2.820.545	3.105.981	6,93
Pengadaan Listrik dan Gas	19.306	19.954	21.131	21.672	22.528	4,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.852	15.767	16.720	17.910	18.839	6,08
Konstruksi	1.843.072	1.966.007	2.107.164	2.258.649	2.429.177	6,73
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.524.503	6.810.510	7.183.459	7.530.250	7.930.489	5,21
Transportasi dan Pergudangan	1.088.865	1.193.942	1.297.777	1.367.292	1.439.962	7,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.029.765	1.117.525	1.202.357	1.305.833	1.423.830	7,47
Informasi dan Komunikasi	733.785	837.335	945.018	1.056.812	1.158.795	13,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	815.704	879.802	960.172	1.000.229	1.052.734	7,37
Real Estate	535.114	564.172	599.601	654.826	719.588	7,15
Jasa Perusahaan	155.150	168.583	183.434	199.659	222.746	7,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.047.870	1.102.599	1.129.284	1.131.394	1.156.083	2,17
Jasa Pendidikan	1.288.697	1.448.370	1.556.705	1.720.021	1.821.502	10,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194.673	224.582	247.388	277.647	299.720	11,08
Jasa lainnya	940.511	1.026.474	1.121.627	1.273.649	1.364.078	10,05
PDRB	30.541.631	31.919.059	33.803.539	35.464.912	37.224.184	5,04
PDRB Tanpa Migas	-	-	-	34.704.580	36.501.107	5,09

Sumber: BPS Kabupaten Garut

Berdasarkan data tabel 1.1, peranan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan berkontribusi kurang lebih 36,5 % dari total PDRB Kabupaten Garut setiap tahunnya. Akan tetapi dalam pertumbuhannya berada dalam posisi tiga terakhir kalah jauh dengan sektor-sektor lainnya, sedangkan luas Wilayah Kabupaten Garut didominasi oleh sektor pertanian, perhutanan dan perikanan, bisa mengakibatkan kurang termanfaatkan.

Selain itu, semua sektor lapangan usaha berpengaruh secara positif setiap tahunnya walaupun berbeda-beda yang saling membantu dalam pertumbuhan PDRB yang rata-ratanya mencapai 5,04 % selama tahun 2014-2018.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten Garut & Jawa Barat (Menurut Lapangan Usaha)

Sumber: BPS Kabupaten Garut dan Jawa Barat

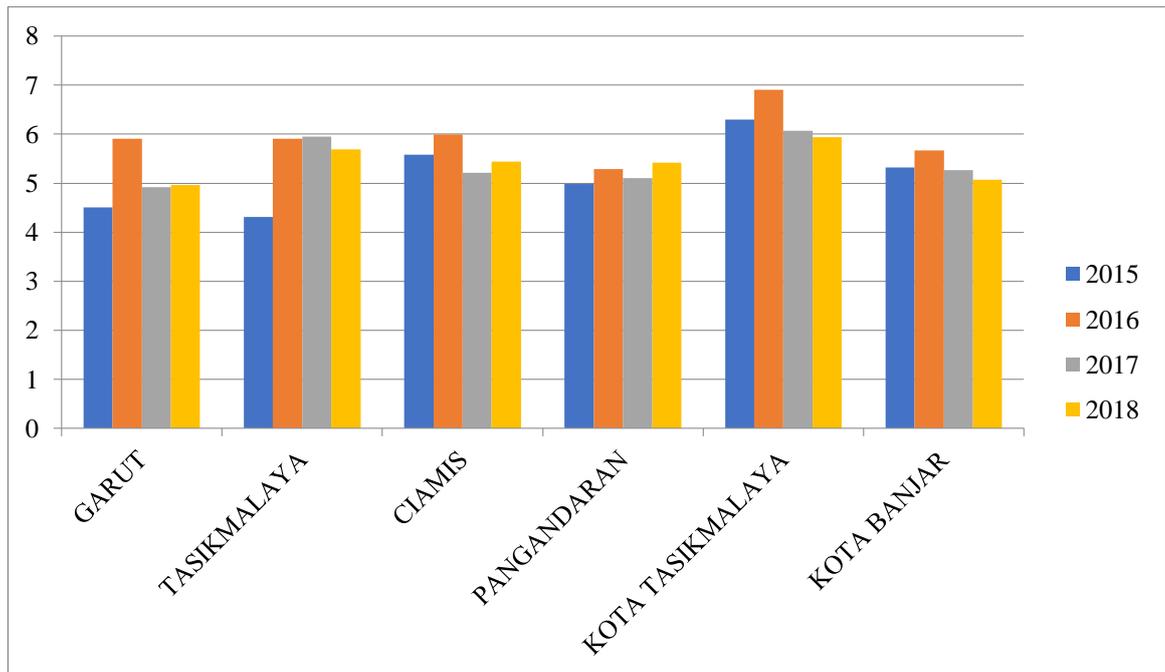
Pada gambar 1.1, terlihat jelas kondisi menyeluruh dari PDRB harga konstan menurut lapangan usaha, bahwa Kabupaten Garut laju pertumbuhannya tidak konsisten. Kondisi terendah terjadi pada tahun 2012 dan kenaikan tertinggi pada tahun 2016. Dibandingkan kondisi laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat, Kabupaten Garut tertinggal, hanya pada tahun 2016 melebihi, sisanya tidak pernah melebihi.

Kabupaten Garut termasuk kabupaten/kota yang berada di area Priangan Timur, kultur dan kondisi perekonomian yang relatif sama sebagai daerah yang masih banyak area perkebunan, pertanian yang menjadi salah satu faktor mata pencaharian masyarakatnya. Selain itu Kabupaten Garut sebagai gerbang masuknya, dari kota kota besar seperti Bandung, Jakarta dan lain-lain, hal ini tidak aneh terlihat ketika hari-hari libur kemacetan jalanya, baik oleh masyarakat asli Priangan Timur ataupun diluar itu yang berwisata di Priangan Timur. Kondisi itu seharusnya membantu peningkatan perekonomiannya lebih baik dibanding kota/kabupaten lainnya di Priangan Timur, dalam memanfaatkan kedekatan wilayah itu dengan kota-kota besar. Hal ini terlihat dari tabel 1.2 dan gambar 1.2:

Tabel 1.2 Data PDRB Harga Konstan di Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Timur (Dalam Rupiah)

NAMA KOTA/KABUPATEN	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Garut	30,541,631	31,919,059	33,803,539	35,464,912	37,224,184
Tasikmalaya	18,849,712	19,662,487	20,824,797	22,063,288	23,319,635
Ciamis	16,839,416	17,779,913	18,844,974	19,826,748	20,904,748
Pangandaran	5,973,549	6,271,096	6,602,733	6,939,637	7,315,304
Kota Tasikmalaya	11,637,308	12,370,623	13,225,248	14,027,797	14,861,531
Kota Banjar	2,491,637	2,624,237	2,772,840	2,918,867	3,066,877

Sumber: BPS Kabupaten Garut dan Jawa Barat



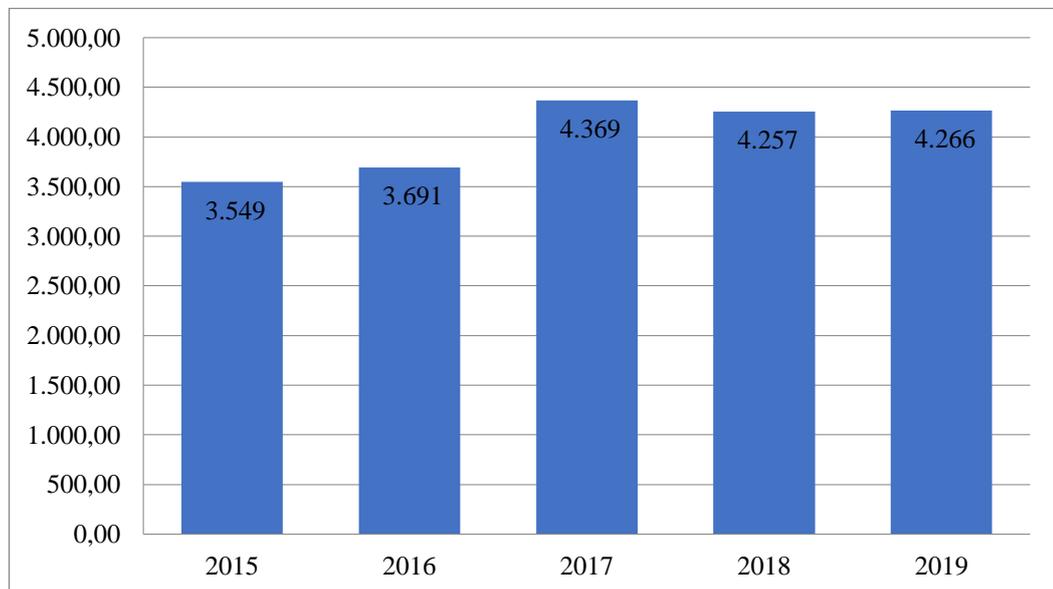
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Timur

Sumber: BPS Kabupaten Garut dan Jawa Barat

Dari gambar 1.2, terlihat jelas bahwa kondisi PDRB Kabupaten Garut unggul, bahkan mencapai 2-15 kali besaran dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Wilayah Priangan Timur. Namun sayang laju pertumbuhan PDRB setiap tahunnya, kalah progres dibanding yang lainnya, bahkan pada tahun 2018 mengalami keadaan terbawah dibanding semuanya. Seperti halnya yang terdapat dalam gambar 1.2.

Kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang

dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat.

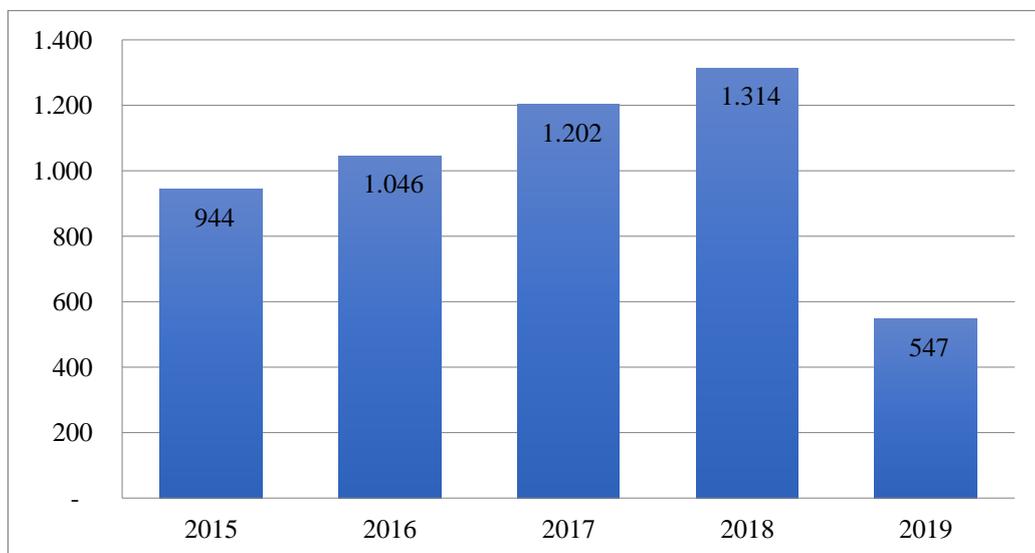


**Gambar 1.3 Belanja Daerah Kabupaten Garut
(Dalam Triliun Rupiah)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut

Terlihat dari gambar 1.3, kondisi belanja daerah Kabupaten Garut mengalami fluktuasi dalam kondisi yang cukup baik hanya saja pada tahun 2017 mengalami kenaikan 68 miliar meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Hal itu dirasa wajar dikarenakan kebutuhan tiap daerah demi masyarakat daerah sendiri, mengalami perubahan setiap tahunnya. Juga karena ini belanja daerah secara total jadi sangat memungkinkan hanya beberapa sub belanja saja yang menyebabkan naik turunnya sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003).

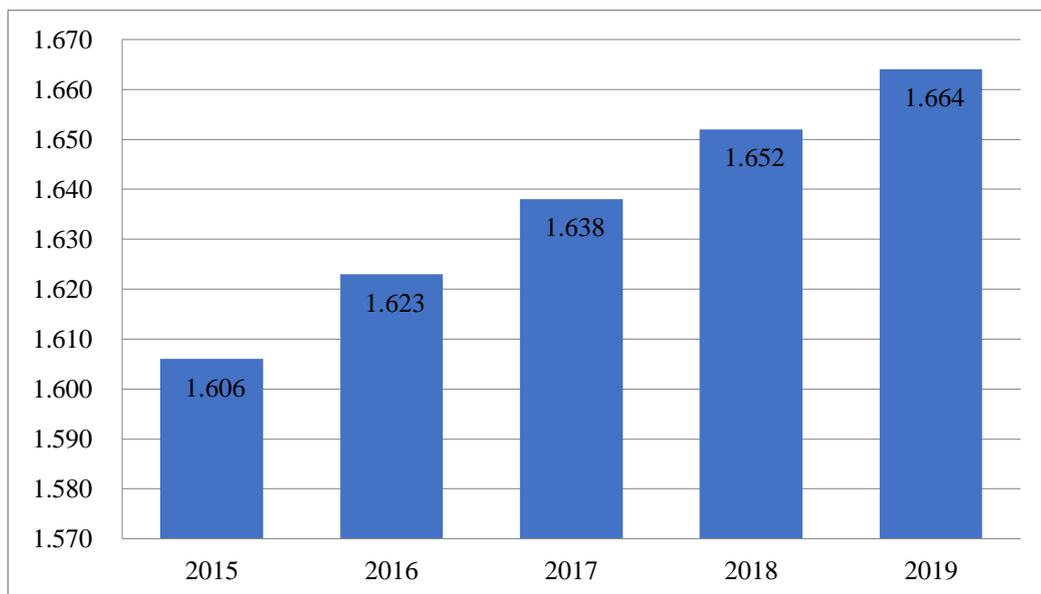


Gambar 1.4 Data Investasi Kabupaten Garut (Dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut

Berdasarkan gambar 1.4, kondisi investasi Kabupaten Garut mengalami peningkatan secara positif setiap tahunnya, membuktikan bahwa kondisi ramah dan aman dalam berinvestasi di Kabupaten Garut bagus. hanya saja pada tahun 2019, mengalami penurunan lebih dari 50 %. Hal ini bisajuga diakibatkan dengan kondisi politik pada tahun 2019

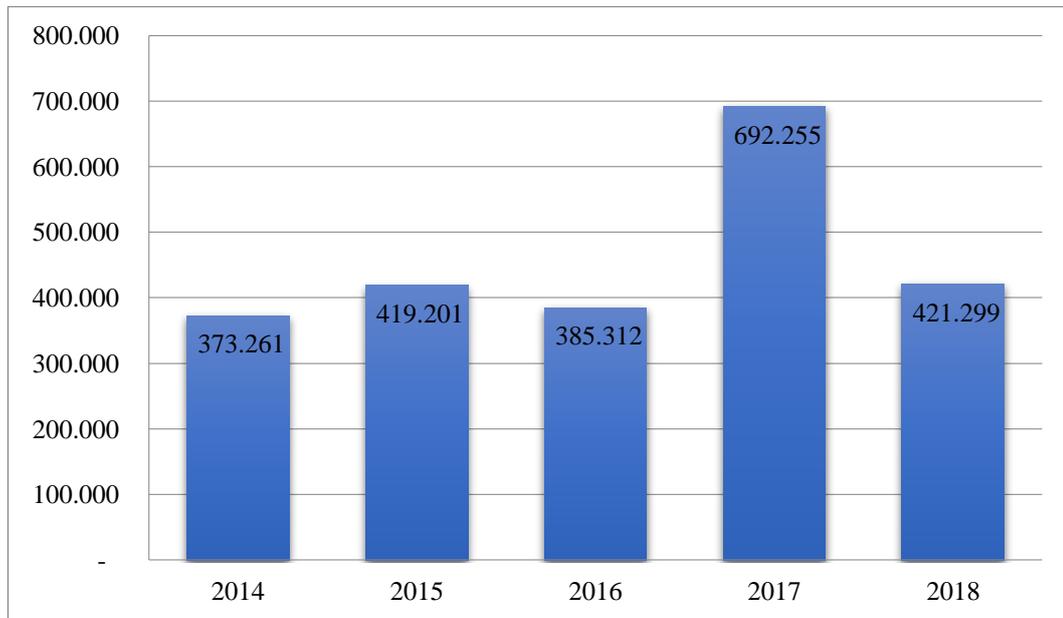
yang semakin memanas yang membuat investor berhati hati. Diluar itu Kabupaten Garut sejalan dengan program kerjasama Pemprov Jabar dengan investor dari Korea, di Garut sendiri ada beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan investor Korea di bidang perkebunan, industri bulu mata dan bidang lainnya.



**Gambar 1.5 Data Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Garut
(Dalam jutaan jiwa)**

Sumber: BPS Kabupaten Garut

Dari gambar 1.5, tergambarakan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam hal tenaga kerja baik di Garut maupun yang bekerja di luar Garut. Untuk di Garut sendiri ada beberapa industri besar yang menampung tenaga kerja yang besar seperti industri bulu mata (Desa Suci), kerajinan kulit (Sukaregang), industri sepatu (Leles), dan lain-lainnya.



**Gambar 1.6 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut
(Dalam Miliar Rupiah)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut

Pada gambar 1.6, tergambar bahwa posisi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktuatif, bahkan yang lebih terasa kenaikannya terjadi pada tahun 2017 sekitar 50 %, akan tetapi pada tahun selanjutnya (2018), mengalami penurunan sebesar Rp270,96 Miliar. Hal ini terjadi bergantung dengan kinerja sektor-sektor perekonomian yang menjadi sumbangsih terhadap PAD itu sendiri.

Misalnya yang paling banyak tentang penelitian sektor industri kulit, industri makanan, waralaba dan lain lain, yang mempengaruhi PDRB itu.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Serta Dampaknya Terhadap PAD Kabupaten Garut Tahun 2010-2019”**. Adapun variabel yang digunakan dalam fenomena tersebut yaitu PDRB dan PAD sebagai variabel terikat, sedangkan belanja daerah, investasi, dan tenaga kerja merupakan variabel bebasnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah:

1. Bagaimana kondisi belanja daerah, investasi, tenaga kerja, PDRB dan PAD di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah, investasi dan tenaga kerja secara parsial terhadap PDRB Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah, investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap PDRB Kabupaten Garut?
4. Bagaimana Pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi belanja daerah, investasi, tenaga kerja, PDRB dan PAD di Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah, investasi, tenaga kerja, PDRB dan PAD di Kabupaten Garut secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah, investasi, tenaga kerja, PDRB dan PAD di Kabupaten Garut secara bersama-sama.
4. Untuk mengetahui Pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai determinasi, serta sebagai salah satu syarat dalam penulisan Usulan Penelitian dan untuk memperoleh gelas sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran mengenai Pengaruh Belanja Daerah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Serta Dampaknya Terhadap PAD Kabupaten Garut Tahun 2010-2019, juga sebagai masukan positif kepada pemerintah Kabupaten Garut dalam penentuan kebijakannya.

3. Bagi pihak lain

Sebagai suatu karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bahan referensi bacaan bagi penelitian berikutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan belanja daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi investasi dari dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT), serta laporan tahunan PDRB dan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka ke dinas-dinas terkait serta menganalisis penelitian terdahulu. Adapun hasil dari penelitian ini akan dipertanggungjawabkan melalui Sidang Usulan Penelitian dan Sidang Komprehensif yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan. Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan dalam matrik jadwal kegiatan pada lampiran 1.